



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021, telah mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
 27. Peraturan Bupati Bangli Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 24) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 6



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44
TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016-2021

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama Organisasi | Pemerintah Kabupaten Bangli |
| 2. Visi | Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang “Gita Shanti” |
| 3. Misi | <ul style="list-style-type: none">1. Membangkitkan perekonomian lokal2. Meningkatkan pendapatan asli daerah3. Pembenahan tata kelola objek wisata4. Menekan angka pengangguran dan kemiskinan5. Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan6. Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien8. Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif9. Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal |
| 4. Indikator Kinerja | |

Sasaran	Indikator	Target Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
Misi 1 : Membangkitkan perekonomian lokal							
Meningkatnya prokduktivitas pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan	Produksi Ikan per hektar (Ton)	3,56	3,62	3,67	3,69	3,71	3,73
	Produksi Daging (Ton)	3.581,10	3.663,68	3.748,76	3.836,17	3.926,17	4.018,57
	Persentase klp tani yang meningkat klas kemampuannya	10%	20%	30%	40%	50%	60%
	Persentase petani dengan pendapatan minimal 2 juta	10%	20%	30%	40%	50%	60%
	Persentase Produksi beras dikonsumsi sendiri	66%	67%	68%	69%	71%	72%
	Persentase Pola Pangan Harapan (PPH)	88,2	88,3	88,4	88,5	88,6	88,7
	Produktivitas Tanaman Pangan Unggulan perhektar (Ton)	6,46	6,95	7,02	7,11	7,22	7,36
	Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan perhektar (ton)	23,97	24,94	25,33	25,73	26,14	26,82

Sasaran	Indikator	Target Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
	Produktivitas Tanaman perkebunan Unggulan perhektar (ton)	0,62	0,67	0,71	0,77	0,82	0,88
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	37%	49%	60%	73%	86%	100%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa guna mendukung produktivitas perekonomian lokal	Persentase masyarakat desa dalam membangun desa	93%	94%	95%	96%	97%	98%
	Persentase peningkatan jumlah LPD sehat	59,85%	61,63%	63,52%	65,41%	67,29%	69,81%
	Persentase Kelembagaan ekonomi pedesaan	0%	0%	45%	45%	65%	63%
Misi 2 : Meningkatkan pendapatan asli daerah							
Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun	16,07%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%
	Jumlah PAD sektor pariwisata	20 M	22,5 M	23 M	23,5 M	24 M	24,5 M
Misi 3 : Pembenahan tata kelola objek wisata							
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	Persentase pengendalian ruang	0%	20%	48%	66%	82%	100%
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	17%	34%	60%	75%	92%	100%

Sasaran	Indikator	Target Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	Persentase Pembangunan jalan dan jembatan	0%	5%	38%	72%	92%	100%
	Persentase penduduk (RT/KK) yang mempunyai akses air minum	9,87%	13%	79%	91%	96%	100%
	Persentase Pelanggaran lalin	46%	44%	42%	40%	38%	36%
Misi 4 : Menekan angka pengangguran dan kemiskinan							
Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61
	Persentase KK/Masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah layak huni	0%	5%%	16%%	41%%	68%	100%
	Umur Harapan Hidup	69,98 th	70,15 th	70,31 th	70,48 th	70,64 th	70,64 th
Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan							
	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RS	88,78%	88,79%	88,80%	88,81%	88,82%	88,83%
	Persentase Penduduk memiliki dokumen kependudukan dan capil	51,80%	54,80%	57,80%	60,80%	63,80%	66,80%

Sasaran	Indikator	Target Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
Meningkatnya cakupan layanan sosial dasar							
	Jumlah KDRT yg tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif	1,07%	1,07%	1,07%	1,06%	1,06%	1,05%
	Persentase PMKS yg menerima jaminan sosial	5,37	5,01	4,63	4,25	3,87	3,49
	Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	2,3	2,49	2,68	2,87	3,06	3,25
	Meningkatnya jumlah transmigran	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Misi 5 : Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan							
Meningkatnya manajemen pendidikan, dan pariwisata	Jumlah pemustaka	996 Rb.	998 Rb.	1000 Rb.	1002 Rb.	1004 Rb.	1006 Rb.
	Angka melek huruf	85,2	86,53	87,86	89,19	90,52	91,85
	APK PAUD	68	71,15	75,18	78,94	82,89	87,03
	Cakupan layanan Pendidikan 9 Tahun	68,42	73,11	74,94	76,78	78,58	80,13

Sasaran	Indikator	Target Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
	Cakupan layanan Pendidikan menengah	43,33	0	0	0	0	0
	Cakupan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	96%	97%	98%	99%	100%	100%
	Cakupan peningkatan mutu manajemen pelayanan pendidikan	92%	93%	95%	97%	99%	100%
Meningkatnya manajemen lingkungan							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,5-62,5	62,5-64,5	64,5-66,5	66,5-68,5	68,5-70,5	70,5-72,5
Misi 6 : Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat							
Meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah	Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	20%	30%	50%	70%	80%	100%
	Pelayanan administrasi kepegawaian sesuai SOP	11,079	11,485	11,613	11,738	11,838	11,971
	Persentase aparatur dan media yang bekerjasama	0%	19,94%	19,94%	19,94%	19,94%	19,94%
	Persentase peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah	74%	78%	82%	86%	90%	90%
	Jumlah system pengadaan langsung yang kredibel	₹	₹	50%	30 OPD	30 OPD	30 OPD

Sasaran	Indikator	Target Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
	Persentase Ormas yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa	75%	80%	85%	90%	92%	95%
Meningkatnya kelembagaan Desa Dinas, Desa Pekraman dan Banjar Adat	Jumlah desa yang meningkat kesadaran hukum dan HAMnya	8 desa	8 desa	9 desa	9 desa	9 desa	9 desa
	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	95%	96%	97%	98%	99%	100%
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	85%	86%	88%	90%	93%	95%
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	74%	78%	82%	86%	90%	90%
Misi 7 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien							
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Pengamanan SPBE	cukup	baik	baik	baik	baik	baik
	Nilai SPBE	4	cukup	baik	baik	baik	baik
	Nilai LPPD	sedang	sedang	tinggi	tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan tepat waktu	60%	66%	72%	78%	84%	90%
	Pemeringkatan PPID	4	4	3	2	1	1

Sasaran	Indikator	Target Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
	Prosentase peningkatan pengadaan barang/jasa	₹	96%	96,25%	96,50%	96,75%	97%
	Jumlah evaluasi dan laporan pengadaan barang/jasa	₹	₹	97%	98%	99%	100%
	Capaian IKM	3,5	3,5	4	4,3	4,6	5
	Persentase kesesuaian produk hukum daerah dengan peraturan perundang-perundang, kepentingan umum,kesusilaan dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks kepuasan masyarakat	0,82	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86
	Persentase tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	95%	96%	97%	98%	99%	100%
	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	95%	96%	97%	98%	99%	100%
	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan capil	51,80%	54,80%	57,80%	60,80%	64,80%	66,80%
	Meningkatnya IndeK kepuasan Anggota DPR terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	81	81,25	81,45	81,55	81,8	82
	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	93%	94%	95%	96%	97%	98%

Sasaran	Indikator	Target Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase Penanganan Bencana	0%	0%	31%	57%	80%	100%
	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi	0%	0%	33%	56%	78%	100%
	Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	0%	0%	11%	23%	35%	100%
	Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD	70%	75%	80%	85%	87%	90%
	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan	0%	0%	40%	63,75%	82,50%	100%
	Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai evaluasi > B	16%	50%	60%	70%	80%	80%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	73%	80%	83%	86%	89%	89%
	Level maturitas SPIP	level 2	level 2	level 3	level 3	level 3	level 3
	Level kapabilitas APIP	level 2	level 2	level 3	level 3	level 3	level 3
Meningkatkan demokratisasi masyarakat Bangli							

Sasaran	Indikator	Target Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
	Penegakan PERDA dan Perkada	70%	74%	78%	82%	86%	90%
Misi 8 : Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif							
Meningkatnya kinerja Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan perdagangan	Meningkatnya kualitas koperasi	92,01	92,8	93,63	94,42	95,55	98,52
	Nilai investasi (Milyar)	105	108,5	111	113	116	118,5
	Peningkatan daya saing UMKM	18,63	20,16	21,69	23,22	24,76	26,29
	Persentase angka pertumbuhan unit usaha industri kecil	0,08%	0,13%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
	Persentase sector industri terhadap PDRB	10,53%	10,83%	11,33%	11,83%	12,33%	12,83%
	Cakupan bina kelompok pengerajin	0,60%	0,67%	1,54%	1,53%	1,57%	1,57%
	Persentase kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	10,56%	10,06%	11,56%	12,06%	12,56%	13,06%
	Ekspor bersih perdagangan	1.237.104.765	824.736.510	824.736.510	870.555.250	870.555.250	916.373.900

Misi 9 : Meningkatnya nilai budaya dan kearifan lokal							
Sasaran	Indikator	Target Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
Meningkatnya nilai budaya dan kearifan lokal	Persentase pengembangan seni dan budaya daerah	2,95%	2,95%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%
	Persentase rangkaian upacara keagamaan yang dilaksanakan	80%	82%	84%	86%	88%	90%
	Persentase cagar budaya yang lestari	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	Persentase desa adat yang lestari	1,74%	3,61%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016-2021

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KEPALA (.....nama Perangkat Daerah.....) KABUPATEN BANGLI
NOMOR :/...../

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (... nama Perangkat Daerah ...) KABUPATEN BANGLI

KEPALA (..... nama Perangkat Daerah.....) KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan (... nama Perangkat Daerah..) Kabupaten Bangli ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (.. nama Perangkat Daerah ...) Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama (... nama Perangkat Daerah..) Kabupaten Bangli;
 - c. perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (... nama Perangkat Daerah..) Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala (..... nama Perangkat Daerah.....);

Mengingat : 1.

2.

3.

4. dst

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengubah Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (..... nama Perangkat Daerah.....) Kabupaten Bangli, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (..... nama Perangkat Daerah.....) Kabupaten Bangli dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) (..... nama Perangkat Daerah.....) Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangli dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan (..... nama Perangkat Daerah.....) Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2020

KEPALA (..... NAMA PERANGKAT
DAERAH.....)
KABUPATEN BANGLI,

(NAMA LENGKAP DAN TITEL)
(NIP.)
(PANGKAT)

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

TUGAS POKOK
FUNGSI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	BIDANG/UNIT PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan	Produksi Ikan per hektar (Ton)	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli
		Produksi Daging (Ton)	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli
		Persentase klp tani yang meningkat klas kemampuannya	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli
		Persentase petani dengan pendapatan minimal 2 juta	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli
		Persentase Produksi beras dikonsumsi sendiri	Pangan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli
		Persentase Pola Pangan Harapan (PPH)	Pangan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli
		Produktivitas Tanaman Pangan Unggulan perhektar (Ton)	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli
		Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan perhektar (ton)	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli
		Produktivitas Tanaman perkebunan Unggulan perhektar (ton)	Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	BIDANG/UNIT PENANGGUNGJAWAB
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa guna mendukung produktivitas perekonomian lokal	Persentase masyarakat desa dalam membangun desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase peningkatan jumlah LPD sehat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Kelembagaan ekonomi pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun	Keuangan	Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
		Jumlah PAD sektor pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	Persentase pengendalian ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase penduduk (RT/KK) yang mempunyai akses air minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	Persentase Pelanggaran lalin	Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tenagakerjaan	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenaga Kerjan dan Transmigrasi
		Persentase KK/Masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah layak huni	Sosial	Dinas Sosial
		Umur Harapan Hidup	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RS	Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	BIDANG/UNIT PENANGGUNGJAWAB
	Meningkatnya cakupan layanan sosial dasar	Jumlah KDRT yg tertangani	Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase PMKS yg menerima jaminan sosial	Sosial	Dinas Sosial
		Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	Tenagakerjaan	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya jumlah transmigran	Transmigrasi	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya manajemen pendidikan, dan pariwisata	Jumlah pemustaka	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Angka melek huruf	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		APK PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Cakupan layanan Pendidikan 9 Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Cakupan layanan Pendidikan menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Cakupan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Cakupan peningkatan mutu manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Meningkatnya manajemen lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli
	Meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah	Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Pelayanan administrasi kepegawaian sesuai SOP	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Persentase aparatur dan media yang bekerjasama	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Persentase peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Jumlah system pengadaan langsung yang kredibel	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Persentase Ormas yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	BIDANG/UNIT PENANGGUNGJAWAB
	Meningkatnya kelembagaan Desa Dinas, Desa Pekraman dan Banjar Adat	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Pengamanan SPBE	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai SPBE	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai LPPD	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan tepat waktu	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Pemeringkatan PPID	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Prosentase peningkatan pengadaan barang/jasa	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Capaian IKM	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase kesesuaian produk hukum daerah dengan peraturan perundang-perundang, kepentingan umum, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Indeks kepuasan masyarakat	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Persentase tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Persentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan capil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Indeks kepuasan Anggota DPR terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	BIDANG/UNIT PENANGGUNGJAWAB
		Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Opini BPK	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Persentase Penanganan Bencana	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai evaluasi > B	Pengawasan	Inspektorat
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Pengawasan	Inspektorat
		Level maturitas SPIP	Pengawasan	Inspektorat
		Level kapabilitas APIP	Pengawasan	Inspektorat
	Meningkatkan demokratisasi masyarakat Bangli	Penegakan PERDA dan Perkada	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Nilai investasi (Milyar)	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Peningkatan daya saing UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase angka pertumbuhan unit usaha industri kecil	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase sector industri terhadap PDRB	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Cakupan bina kelompok pengerajin	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	BIDANG/UNIT PENANGGUNGJAWAB
		Ekspor bersih perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya nilai budaya dan kearifan local	Persentase pengembangan seni dan budaya daerah	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase rangkaian upacara keagamaan yang dilaksanakan	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Persentase cagar budaya yang lestari	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase desa adat yang lestari	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KEPALA (... NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN BANGLI,

(NAMA LENGKAP DAN TITEL)
(NIP.)
(PANGKAT)

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR